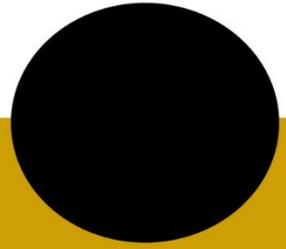


Published by Akar Foundation



Scoping Study

---

# Selisik Arus Pendapatan dan Informasi Pertambangan Batu Bara di Bengkulu

---

With Contributions by Natural Resources Governance Institute

# **Scoping Study**

## **Selisik Arus Pendapatan dan Informasi Pertambangan Batu Bara di Bengkulu**

# **Selsisik Arus Pendapatan dan Informasi Pertambangan Batu Bara di Bengkulu**

@Akar Foundation

*All Rights Reserved*

## **Editor:**

Erwin Basrin

## **Kontributor:**

Sugian Bahanan, Bunaya Suparda

Cover: Erwin Basrin

Penata Letak: Pramasty Ayu Kusdinar

Edisi Pertama: 2013

Edisi Revisi: 2018

Penerbit:

Akar Foundation

Jl. Bakti Husada 8 No 17 D Rt 13 Rw 01 Lingkar Barat  
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu 38225-B

## **Scoping Study Arus Pendapatan dan Informasi Terkait Pertambangan Batu Bara di Bengkulu**

### **PENDAHULUAN**

Dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, menjelaskan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau keseluruhan tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batu bara meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dan kegiatan pasca tambang. Tahapan-tahapan kegiatan pertambangan ini haruslah mengacu pada asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan secara terencana yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang bagi peningkatan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja.

Di dalam Perencanaan Tata Ruang (RTRW) Propinsi Bengkulu, disebutkan tujuan pengelolaan kawasan pertambangan adalah untuk memanfaatkan sumberdaya mineral, energi dan bahan galian lainnya, untuk masyarakat, dengan tetap memelihara sumberdaya sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. Suatu tempat dapat dinyatakan sebagai tempat penambangan apabila nilai bahan galian yang ada bernilai ekonomis lebih tinggi dari nilai kegiatan yang ada di atas tanah. Penggalan bahan tambang dapat dilakukan secara besar-besaran oleh perusahaan berbadan hukum atau kecil-kecilan oleh perorangan dengan

luas minimum 10 hektar. Dan semua pemanfaatan potensi sumber daya mineral yang ada tersebut perlu dilengkapi dengan studi AMDAL terlebih dahulu. Pemanfaatan atau eksploitasi kawasan pertambangan wajib melaksanakan pemulihan kondisi permukaan lahan kepada kondisi tertentu yang tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan alam.

Provinsi Bengkulu memiliki cadangan sumber daya mineral yang cukup banyak meliputi Pengelolaan usaha pertambangan yang ditetapkan dalam wilayah pertambangan (WP), terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan wilayah pencadangan negara (WPN), sedangkan untuk potensi usaha pertambangan dapat dikelompokkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan batu bara.

Dalam naskah pembangunan provinsi Bengkulu telah coba ditetapkan beberapa daerah eksplorasi baru, yang sampai awal tahun 2011 ini masih berada di proses pengurusan izin. Pada kabupaten Lebong, investor dari Korea berusaha untuk mendapatkan izin eksplorasi, dengan kawasan eksplorasi berada di daerah hulu ketenong, dimana rencana kawasan eksplorasi berbatasan dengan kawasan TNKS (Taman Nasional Kerinci Sebelat). Kawasan lain adalah di daerah Penago di Kabupaten Kaur, dengan rencana pembebasan lahan untuk kawasan eksplorasi batu bara yang berjumlah sekitar 1000 hektar.

Tentu sektor pertambangan Batu Bara merupakan sektor di Provinsi Bengkulu. Hingga kini cadangan batu bara di Provinsi Bengkulu diperkirakan mencapai 147,85 juta ton, sebanyak 128,14 juta ton berada di Kabupaten Bengkulu Utara dan 19,72 juta ton berada di Kabupaten Seluma, dan beberapa ton lainnya yang belum tercatat berada di kabupaten Kaur dan

Kabupaten Lebong. Seiring meningkatnya produksi batu bara dan akumulasi stok yang ada, pada tahun 2008 ekspor batu bara dari Propinsi Bengkulu mencapai 1.017.829,162 ton/m<sup>3</sup>, dengan nilai ekspor sebesar US\$ 39.743.554,810, dengan tujuan ekspor terbesar ditujukan kepada Negara India dan Malasia.

Bengkulu dalam angka mencatat pada tahun 2009, jumlah investasi sektor pertambangan batu bara sejumlah 27.814.879,949 di lahan seluas 3.577,65 Ha. Eksploitasi deposit batu bara di Propinsi Bengkulu diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan dalam sektor ekonomi bagi masyarakat sekitar, juga diharapkan dapat mendorong penguatan, pengembangan dan pemberdayaan sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, titik tekan diletakkan pada fungsi sosial perusahaan terutama pada tanggungjawabnya terhadap pembangunan kawasan yang memberi kontribusi bagi masyarakat sekitar secara langsung melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) maupun pendapatan daerah melalui penerimaan pajak sektor industri ekstraksi Batu Bara.

Di awal Tahun 2010 hasil investigasi awal Akar Foundation di beberapa perusahaan batu bara, guna melihat pola pertambangan Batu Bara yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu, dari data-data yang ada pada PT Rekasindo Guriang Tambang, PT Indonesia Riau Sri Afantika (IRSA), Firman Ketahun (FK) dan PT Putra Naga Naditama, sepanjang tahun 2009 penjualan Batu Bara yang berasal dari Bengkulu Utara berjumlah 815.809.647 ton dan data ini tidak jauh beda dengan PT Pelindo, dari total yang dikeluarkan ini Pemkab hanya mendapatkan royalti/pajak sebesar Rp. 427.708.834. tentu saja jumlah ini tidak sebanding dengan

kerusakan infra struktur dan lingkungan akibat dari eksploitasi ini.

Sedangkan untuk beberapa daerah lain seperti, Kabupaten Seluma, proses eksplorasi masih terlibat dengan konflik dengan masyarakat setempat. Walaupun sampai sekarang proses eksploitasi masih berlangsung. Akan tetapi mengenai volume hasil eksplorasi dan capaian peningkatan PAD belum ada sama sekali, hal ini dikarenakan koordinasi antar dinas di daerah dan propinsi masih kurang baik.

Beberapa hal juga yang menjadi catatan penting hasil dari investigasi awal ini adalah, menyangkut tentang kontribusi secara langsung bagi masyarakat yang berada di kawasan tambang. Baik kontribusi secara ekonomi maupun akses keberdayaan social masyarakat setempat. Sebagai kesimpulan awal yang bisa di katakan disini adalah, pertama secara institusional, perusahaan tambang yang ada belum mampu mensejahterakan masyarakat setempat baik secara ekonomi maupun penguatan kelembagaan yang ada di masyarakat sekitar tambang. Alasan ini dikemukakan karena menyangkut tentang alokasi dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang tidak tepat sasaran.

Ada sekitar 3 milyar dana CSR yang tidak terserap secara baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dimana secara faktual ada sekitar 3 ribu jiwa, jumlah penduduk yang berdomisili di daerah sekitar pusat eksploitasi yang harus menerima beban kerusakan ekologis dan kehilangan akses sumber daya ekonomi, karena peralihan kawasan pertanian menjadi kawasan tambang.

Hasil pertemuan terakhir antara Akar Foundation dengan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Dan Propinsi.

Di temukan belum adanya kepastian data hasil ekplorasi yang bisa di gunakan sebagai acuan dasar dalam mengukur kontribusi positif yang di hasilkan oleh proses eksploitasi bagi peningkatan PAD dan Kelangsungan hidup masyarakat di sekitar tambang. Data perkiraan yang ditampilkan oleh pihak pemangku kebijakan yakni hanyalah data hasil ekplorasi yang di laporkan oleh pihak perusahaan pertambangan itu sendiri. Sampai saat ini Belum ada upaya pengawasan hasil ekplorasi yang di lakukan oleh pihak pemangku kebijakan.

Melihat hal tersebut di atas, maka Akar Foundation akan melakukan proses asesment dan kajian, guna melihat lebih jauh kontribusi pertambangan batu bara di Bengkulu, baik secara operasional pada tingkat teknis pelaksanaan maupun pada tingkat kebijakan di daerah. Dengan hasil kajian ini diharapkan akan muncul deskripsi dan catatan penting yang dapat dijadikan kesimpulan serta rekomendasi dalam pemenuhan asas pertambangan yang keberlanjutan dan berwawasan lingkungan secara terencana yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang bagi peningkatan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja

### **Tujuan dan Metodologi Study**

Tujuan utama dilaksanakan kajian ini adalah untuk mendapatkan gambaran konkrit berupa data dan informasi obyektif tentang dampak dan kontribusi sektor industri pertambangan batu bara terhadap proses pembangunan (pendapatan Negara melalui Pajak) dan kesejahteraan masyarakat (Corporate Social Responcibility/CSR) di

Propinsi Bengkulu. Lokasi study difokuskan di wilayah Admistratif Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah salah satu Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara, kedua kabupaten ini merupakan Kabupaten terbesar penghasil batu bara di Propinsi Bengkulu.

Untuk sampai pada tujuan ini, pemenuhan struktur pelaksana study merupakan hal mendasar yang harus dipersiapkan. Pada tahap awal tindakan untuk menentukan pembagian peran dan tanggung jawab (*job description*) dari masing-masing komponen pelaksana menjadi kunci utama, Pada tahapan ini, juga diidentifikasi sumberdaya pendukung (*support system*) dalam proses pelaksanaan study. Tahapan ini bertujuan untuk mempersiapkan material dasar dan perangkat/sarana penunjang guna kelancaran pelaksanaan setiap tahapan study. Langkah selanjutnya adalah melakukan konsolidasi tim pelaksana guna mendudukkan pemahaman secara bersama tentang strategi dan sasaran yang ingin dicapai menyangkut manajemen dan teknis pelaksanaan.

Adanya Data dan Informasi obyektif baik secara kuantitatif dan kualitatif tentang Pertambangan Batu Bara di Bengkulu adalah kunci dari penyusunan analisis study. Tindakan Assesment data yang dilaksanakan untuk mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif tentang industri pertambangan batu bara meliputi alur produksi, proses kebijakan, pendapatan negara di Bengkulu, secara teknis akan digali data-data meja dan data-data lapangan (primer dan skunder). Sehingga, di tingkat lapangan dilaksanakan *field research* secara menyeluruh menyangkut beberapa issue tentang ekologi, perubahan bentang alam, dampak sosial dan budaya masyarakat sekitar pertambangan dan secara teknis

dilakukan observasi, interview (komunikasi langsung dan tidak langsung) dan pertemuan dengan masyarakat di beberapa simpul, pemerintahan daerah dan instansi teknis. Untuk mendapatkan data meja dilakukan tindakan mengumpulkan semua data menyangkut kebijakan, pendapatan dan alur produksi pertambangan di Bengkulu dengan menggunakan teknik study dokumenter/billiographicis.

Kompilasi dan analisis data dilakukan ketika proses penggalian informasi dan data selesai dilaksanakan. Secara teknis kegiatan ini akan dilakukan dengan cara mengelompokkan data dan informasi yang didapat menjadi menjadi dua kelompok, yaitu: bagian data dan informasi kuantitatif dan bagian data informasi kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menggabungkan kedua informasi dan data menjadi satu kesatuan hasil kajian. Hasil analisis ini akan menjadi bahan utama dalam membuat kertas posisi (*Position Paper*) sebagai rekomendasi bagi para pihak terkait, dalam perumusan kertas posisi dilibatkan beberapa orang akademisi dari Universitas Bengkulu dan para pihak berkepentingan lainnya.

## BENGKULU DAN PERTAMBANGAN

### 1. Pengantar Sejarah Pertambangan di Bengkulu



Pertambangan Rakyat di Lebong Simpang, Sumber [curuprejangpost.blogspot.com](http://curuprejangpost.blogspot.com)

Di Sumatera, khususnya di Bengkulu sejarah pertambangan umum dimulai jauh sebelum zaman kolonial, sumber utama pertambangan yang ada adalah emas yang berada di wilayah Lebong. Lebong ini adalah satuan wilayah yang berada di wilayah Timur Bengkulu, berada di ketinggian antara 700-1200 dpl dan secara fisik berada dilereng gugus bukit barisan. Lebong dalam bahasa lokal Rejang diartikan dengan tempat berkumpul, dan ini merujuk pada gumpalan deposit emas yang disebut dengan bahasa lokal dengan ‘urat’ maka sampai saat ini dimana tambang di eksplorasi maka tempat tersebut dinamai dengan Lebong.

Penaklukan pertama oleh kolonial Belanda pada tahun 1866, dan dituangkan dalam kesepakatan dan disepakati di

Topos yang merupakan bagian wilayah adat Jurukalang yang kemudian Pemerintahan Kolonial pertama kalinya melakukan eksploitasi tambang emas yang sampai saat ini dikenal dengan wilayah Lebong Simpang, dan Lebong Tambang. Pengambilalihan urusan pertambangan dari komunitas adat atau Marga di wilayah Bengkulu tentu saja mengacu pada kebijakan kolonial Mijn Reglement 1850.<sup>1</sup>

Mijn Reglement 1850 menjadi satu landasan hukum yang dipakai oleh kolonial Belanda untuk mengambil alih, mengatur serta memanfaatkan bahan mineral untuk kepentingan Pemerintahan Belanda namun dari literatur yang ada pada awal penjajahan Belanda, di wilayah Rejang yang merupakan sebagai wilayah penghasil emas dan ditemukan adanya beberapa izin konsesi yang diberikan kepada pihak swasta.

Menurut catatan Helfrich, tahun 1870 merupakan tahun tersulit dan puncak kemunduran bagi kekuasaan elit pribumi terutama di wilayah Rejang yang mempunyai deposit mineral, karena pada tahun tersebut jabatan *regent* (bupati) dihapus.<sup>2</sup>

Keresidenan Bengkulu merupakan salah satu pengekspor emas dan perak yang utama di Hindia Belanda, pada tahun 1936 bernilai f. 3.538.00 yang berarti 94,5 % dari seluruh ekspor dari Hindia Belanda yang bernilai f. 3.715.00. Ada dua perusahaan tambang terkemuka yaitu perusahaan tambang Simau dan Perusahaan Tambang Redjang-Lebong,

---

<sup>1</sup> Akar Foundation-Siemempuu Foundation, Laporan Riset Dominasi Penguasaan Tanah Adat Jurukalang, 2010

<sup>2</sup> O.L.Helfrich, De Adel van Bengkoelen en Djambi (1892-1901), AB, deel.XXII Gemengd ('sGravenghage-Nijhoff, 1923)

Tambang Redjang-Lebong merupakan perusahaan tertua yang berdiri tahun 1897 dengan nama Perusahaan Ekplorasi Emas Redjang-Lebong dan pada tahun 1898 menjadi Perusahaan Tambang Redjang-Lebong dengan konsesi 4.079 bau selama 75 tahun dengan pembayaran cukai 10 % dari hasil bersih dan biaya sewa sebesar 0,25/bau, namun pada tahun 1936 perusahaan Tambang Redjang-Lebong ditutup sementara tetapi kemudian beroperasi kembali karena mendapatkan daerah penambangan baru dengan 23 izin konsesi dari perusahaan tambang milik pemerintah.<sup>3</sup>

Bisa saja dihubungkan kondisi ini karena perubahan yang terjadi di pemerintahan Kolonial dimana terjadi perubahan Mijl Reglement 1850 menjadi Mijlwet 1899, sebuah hukum pertambangan yang dibuat oleh Staten Generaal dengan Pemerintahan Pusat di Negeri Belanda, dalam aturan tersebut posisi pemerintahan Hindia Belanda amat sentral dalam mengurus urusan pertambangan di wilayah jajahannya.

Urusan tata kelola pertambangan ini tidaklah terlalu berubah, meskipun kemudian Indonesia Merdeka, kebijakan konsitusi yang dimuat dalam Pasal 33 UUD 1945 yang secara filosofis sangat kental nuansi sosialis yang secara nyata menyatakan bahwa Negara adalah pemilik sekaligus pemegang mandat penguasa atas mineral yang terkandung di dalam tanah, dan atas mineral serta logam yang ditambang dan diproses. Turunan dari konstitusi ini kemudian dijabarkan dalam UU No 37 PRP Tahun 1960 tentang Pertambangan, yang sangat anti modal besar dan modal asing. Tujuh tahun kemudian lahir UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan

---

<sup>3</sup> Besluit 19 maart 1898 No.8

Umum yang mengiringi UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan Umum ini dibuat dengan mangacu pada TAP MPRS No XXXI/MPRS/1966, TAP XXIII/MPRS/1966 dan TAP No XXXIII/MPRS/1966, pertimbangannya adalah Guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi Nasional dalam menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materil dan spirituil berdasarkan Pancasila makaperlulah dikerahkan semua dana dan daya untuk mengelola dan membina segenap kekuatan ekonimo potensial di bidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi riil. Konsiderann UU tersebut sangatlah kental dengan nuansa pembangunan ekonomi yang masif akibat kondisi ekonomi ketika itu mengalami persoalan serius. Usaha rehabilitasi ekonomi inilah kemudian menjadi landadan pemanfaatan kekayaan alam, termasuk deposit mineral yang terkandung dalam bumi Indonesia yang memang berlimpah ruah, kemudian dimanfaatkan secara baik oleh pemilik modal untuk mengali kekayaan alam sekaligus sebagai pemicu kontroversi atas industri ekstraktif.

Pada tataran operasional UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan Umum ini kemudian memperkenalkan Kuasa Pertambangan serta Perjanjian/Kontrak Karya antara Pemerintah dengan Swasta (Badan Usaha Nasional dan Perseorangan guna melaksanakan usaha Pertambangan. Kontrak Karya/KK untuk galian strategis (Golongan A), Galian Vital (Golongan B), Izin Pertambangan Rakyat padaq Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta usaha pertambangan untuk Bahan Galian (Golongan C) yang

diberikan kepada Pemerintahan Daerah, kemudian pada tahun 1981 Pemerintah kemudian memperkenalkan Perjanjian Karya Penguasaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Perubahan Tata kelola Pelaksanaan Kuasa Pertambangan seperti yang disebut diatas dijabarkan dalam PP No 75 tahun 2001 kemudian menyatakan bahwa KP, KK dan PKP2B yang diterbitkan Pemerintah sebelum tanggal 1 Januari 2001 tetap berlaku sampai berakhirnya KP, KK dan PKP2B dimaksud. Sekumpulan beberapa kebijakan terkait dengan Pertambangan dan Intervensi Kapital/Modal misalnya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menunjukkan bahwa kumpulan kebijakan tersebut bukan hanya teks baku yang kaku tapi adalah konsentrasi spirit yang kemudian disebut dengan Pembangunan dengan dalil untuk keuntungan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Secara geologis untuk memastikan kontribusi sektor pertambangan bagi kemakmuran rakyat sungguh masuk akal, wilayah Indonesia memiliki potensi endapan-endapaan batubara yang sangat luas. Namun batubara yang bernilai ekonomis untuk dikembangkan hanya terkonsentrasi pada cekungan-cekungan tersier tertentu di Pulau Sumatera dengan persentase sebesar 46,68% dan menurut Bank Dunia, Indonesia merupakan salah satu negara penting dalam bidang pertambangan. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa Indonesia sebagai negara produsen terbesar ke-8 di dunia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, padatahun 2004 komoditas tambang batubara memiliki sumber daya yang paling banyak untuk dieksplorasi dibandingkan dengan komoditas mineral tambang lainnya yaitu sebesar 50

miliar ton, dengan cadangan 5 miliar ton dan tingkat produksi sebesar 160 juta ton.

Salah satu sumber untuk keuntungan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat adalah PP Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tidak menyebutkan secara spesifik PNBPN di bidang pertambangan umum, namun menyebutkan jenis-jenis PNBPN di Departemen ESDM yaitu pelayanan jasa bidang geologi dan sumber daya mineral; iuran tetap/*landrent*; iuran eksplorasi/iuran eksploitasi/royalti; dana bagi hasil produksi batubara; jasa teknologi/konsultasi eksplorasi mineral, batubara.

Bumi Bengkulu tetap menarik dan menggiurkan bagi para investor. Terbukti, sampai saat ini sebanyak 34 perusahaan masih eksis dan bertahan menanamkan investasinya di Provinsi Bengkulu. Rinciannya, 12 perusahaan menggunakan fasilitas PMA (Penanaman Modal Asing) dengan realisasi investasi US\$ 826.126.894.565 dan 22 perusahaan dengan fasilitas PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dengan realisasi investasi Rp 66.526.642.398,649. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi mereka di Bengkulu cukup prospektif untuk jangka panjang, dan menunjukkan bahwa Provinsi Bengkulu merupakan daerah yang cukup strategis untuk melakukan investasi. Dibidang pertambangan, terdapat perusahaan PT Bukit Sunur yakni eksplorasi pertambangan batu bara di Kabupaten Bengkulu Utara dengan total investasi Rp4.647.094.000. Sementara PT Bukit Bara Utama menanamkan modalnya hingga Rp16.700.000.000. asumsinya

adalah semakin banyak investasi masuk, maka akan membantu percepatan pembangunan Provinsi Bengkulu.

## **2. Propil Singkat Bengkulu**

### **Letak Propinsi Bengkulu**

Propinsi Bengkulu terletak di sebelah Barat punggungan Bukit Barisan, luas wilayah administratif Propinsi Bengkulu  $\pm 1.978.870$  Ha atau  $\pm 19.788,7$  Km<sup>2</sup>. Wilayah Propinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Propinsi Sumatera Barat sampai Perbatasan Propinsi Lampung, jarak bentangan ini sepanjang  $\pm 567$  Km.

Secara geografis Propinsi Bengkulu terletak di 2° 16'-3° 31' Lintang Selatan dan 101° 01'-103° 41' Bujur Timur, dan secara fisik sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Propinsi Lampung, di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jambi dan Propinsi Sumatera Selatan.

Propinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis panjang sepanjang  $\pm 525$  Km, sedangkan bagian Timur berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedangkan bagian Barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit memanjang dari Utara ke Selatan serta diselingi dengan kondisi daerah yang bergelombang.

## **Topografi Wilayah Bengkulu**

Berdasarkan topografi Propinsi Bengkulu secara umum di kategorikan menjadi 3 jalur utama yang bisa dirincikan sebagai berikut; *Jalur Pertama* adalah daerah yang terletak pada ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut yang kemudian diklasifikasikan sebagai daerah *low land* dengan luas mencapai 708.435 Ha atau mencapai 35,80 %. *Jalur Kedua* adalah semua daerah yang terletak pada ketinggian 100-1.000 meter dari permukaan laut, posisi wilayah jalur kedua ini berada tepat di sebelah Timur dari jalur pertama. Daerah tersebut merupakan lereng pengunungan Bukit Barisan dan terklasifikasi sebagai daerah *Bukit Range*. Propinsi Bengkulu di bagi kedalam dua kelompok yaitu daerah dengan ketinggian antara 100-500 meter dan ketinggian 500-1.000 meter. Luas daerah yang berada pada ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut mencapai 625.323 Ha atau 31,60 %, sedangkan daerah yang berada pada ketinggian antara 500-1.000 meter dari permukaan laut mencapai 405.688 Ha atau seluas dengan 20,50 % dari luas wilayah Propinsi Bengkulu. Dan, *Jalur ketiga* adalah daerah yang terletak pada ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut, posisi jalur ini berada di sebelah Timur jalur kedua sampai ke puncak pengunungan Bukit Barisan. Daerah tersebut umumnya merupakan daerah kegiatan vulkanis dan tektonis luas daerah pada ketinggian ini mencapai 239,924 Ha atau sekitar 12,10 % dari luas Propinsi Bengkulu.

## **Pemerintahan di Bengkulu**

Perubahan politik Nasional juga berdampak pada perubahan politik daerah, kebijakan penyelenggaraan pemerintah dari sistem sentralistik menjadi desentralisasi dan otonomi daerah di satu sisi memberikan dampak positif bagi Propinsi Bengkulu, Ekpektasi Pemerintahan Pusat ini memberikan peluang dan kesempatan kepada Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih mandiri sehingga pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien untuk percepatan pelaksanaan pembangunan.

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, Propinsi Bengkulu telah dimekarkan menjadi 9 Daerah Kabupaten dan 1 Kotamadya, dari sebelumnya 3 Kabupaten dan 1 Kotamadya. Kabupaten Bengkulu dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yakni Kabupaten Bengkulu Utara yang beribukota di Arga Makmur, Kabupaten Mukomuko dengan Ibukota Mukomuko yang dibentuk berdasarkan UU No 3 Tahun 2003 yang satu paket dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dan yang baru dimekarkan adalah Bengkulu Tengah yang ibukotanya berada di Karang Tinggi.

Kabupaten Bengkulu Selatan dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan yang beribukota di Manna, Kabupaten Kaur yang ber ibukota di Kaur dan Kabupaten Seluma ber ibukota di Seluma kedua Kabupaten Pemekaran ini disyahkan oleh UU No 3 Tahun 2003. Sedangkan Kabupaten Rejang Lebong dimekarkan menjadi 3 Kabupaten Yaitu Kabupaten Rejang Lebong yang ber ibukota di Curup, dan Kabupaten hasil pemekarannya adalah Kabupaten Kepahiang yang ber ibukota di Kepahiang dan

Kabupaten Lebong yang ber ibukota di Tubey kedua Kabupaten ini disyahkan melalui UU No 39 Tahun 2003.

Disamping dengan pemekaran Kabupaten yang dilakukan oleh Pemerintahan Propinsi Bengkulu dengan Kabupaten induk, Kecamatan dan Desa atau Kelurahan di Propinsi Bengkulu juga mengalami Pemekaran, sampai saat ini Propinsi Bengkulu telah terbentuk 104 Kecamatan, 135 Kelurahan dan 1.143 Desa. Sehingga distribusi persentase luas masing-masing wilayah setelah pemekaran tersebut adalah sebagai berikut Kabupaten Lebong 9,75 % dari luas total, Kabupaten Kepahiang 3,56 %, Kabupaten Bengkulu Selatan 5,96 %, Kabupaten Rejang Lebong 7,46 %, Kabupaten Bengkulu Utara 28,04 %, Kota Bengkulu 0,73 %, Kabupaten Mukomuko 20,40 %, Kabupaten Kaur 11,97 % dan Kabupaten Seluma 12,13 %.<sup>4</sup>

### **Pertambangan di Bengkulu**

Sektor pertambangan di Propinsi Bengkulu utamanya adalah Batu Bara dan berkonsentrasi di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. Hingga kini cadangan batu bara yang ada di Propinsi Bengkulu diperkirakan mencapai 147,85 juta ton, rinciannya adalah di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Utara mencapai 128,14 juta ton dan Kabupaten Seluma mencapai 19,72 juta ton.

Di Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini ada 7 perusahaan yang beroperasi yang dikelola oleh investor dari China dan India, perusahaan tersebut antara lain PT. Bukit Sunur, PT. Danau Mas Hitam dan PT Bina Bara Lestari. Dan 4

---

<sup>4</sup> Bengkulu Dalam Angka 2007

perusahaan lainnya beroperasi sejak tahun 2004. Sebagian besar hasil eksploitasi bata bara tersebut diekspor ke Asia dan Eropa, jumlah produksi batu bara dari Bengkulu Tengah sekitar 200-400 ton per tahun, Kualitas batu bara di Kabupaten Tabalong di atas 6.000 kalor. Dari data yang ada di Dinas Pertambangan Propinsi Bengkulu pada tahun 2011 saja terjadi penjualan sebanyak 3,2 juta ton dari target 4 juta ton.

### **Data Industri Ekstraktif**

Saat ini ada beberapa perusahaan batu bara yang beroperasi di Bengkulu, khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah;

No	Nama Perusahaan	Lokasi Eksploitasi
1	PT. Bukit Sunur	Bengkulu Tengah
2	PT. Kusuma Raya Utama	Bengkulu Tengah
3	PT. Core Mineral Indonesia	Bengkulu Utara
4	PT. Rekasindo Guriang Tandang	Bengkulu Utara
5	PT. Kaltim Global	Bengkulu Utara
6	PT. Inti Bara Perdana	Bengkulu Tengah
7	PT. Bara Indah Lestari	Bengkulu Utara
8	PT. Indonesia Riau Sri Avantika	Bengkulu Utara
9	PT. Ratu Samban Mining	Bengkulu Tengah
10	PT. Titan Mining Indonesia	Bengkulu Utara
11	PT. Bara Adhipratama	Bengkulu Utara
12	PT. Danaumas Hitam/CS	Bengkulu Tengah
13	PT. Danaumas Hitam/Borneo	Bengkulu Tengah
14	PT. Danaumas Hitam/MAS	Bengkulu Tengah
15	PT. Danaumas Hitam/MK	Bengkulu Tengah
16	PT. Injatama	Bengkulu Utara

17	PT. Lahat Centra Coalindo/LCC	Bengkulu Utara
18	PT. Farming Lefto	Bengkulu Utara
19	PT. Firman Ketahun	Bengkulu Utara
20	PT. Ferti Rejang	Bengkulu Utara
21	PT. Mitra Niaga Sejati	Bengkulu Utara
22	PT. Panca Makmur Bersama	Bengkulu Utara
23	PT. Sanfak Jaya Marine	Bengkulu Utara
24	PT. Bara Sirati Unggul Permai	Bengkulu Tengah
25	PT. Mitra Padjajaran Prima	Bengkulu Utara
26	PT. Dinamika Selaras Jaya	Bengkulu Utara

*Data di olah di tahun 2013, Akar Foundation.*

### **Data Produksi**

Dari data produksi yang ada pada Bengkulu Dalam Angka 2009 terjadi kenaikan disetiap tahunnya, seperti pada tabel berikut;

Tahun	Produksi	Luar Negeri (ekspor)	Dalam Negeri (Domestik)	Jumlah Total
2003	417,963,92	336,404,00	41,726,00	378,130,00
2004	553,716,97	505,099,08	5,893,65	510,992,73
2005	673,542,31	635,361,42	70,908,91	706,270,33
2006	787,291,33	718,125,12	42,081,30	760,206,42
2007	933,904.16	883,957,98	9,401.95	893,359.93
2008	967,510.63	1.018,852.34	33,985,06	1,052,837,40
2009	1,445,287,49	852,417,27	383,698,82	1,236,116,09

Sementara pada tahun 2009 dari data yang dikeluarkan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Bengkulu, terjadi perbedaan angka dimana jumlah Batu Bara

sebesar 1.391.880 Ton, Cangkang 74.588 Ton dan total jumlah 1.466.468 Ton.

Pada tahun 2011 terjadi kenaikan Data Produksi dan Penjualan/Pengapalan Batu Bara di Bengkulu sebesar 3.631.968,645 Ton dengan rincian sebagai berikut;

No	Perusahaan	Penjualan		Produksi (Ton)	Keterangan
		Dalam Negeri	Luar Negeri		
1	PT. Ratu Samban Mining	0,00	292.091,408	313.204,850	Penjualan luar negeri
2	PT. Bukit Sunur	25.717,429	65.968,654	103.611,904	Jepang, Srilangka, India, China dan Korea
3	PT. Inti Bara Perdana	16.138,434	84.210,894	109.669,510	Malaysia, Thailand dan Philipina
4	PT. Kusuma Raya Utama	54.332,414	150.334,195	233.911,580	
5	PT. Danau Mas Hitam	117.082,791	252.889,686	468.108,031	
6	PT. Indonesia Riau Sri Avantika	61.872,605	67.926,153	117.076,070	
7	PT. Firman Ketahun	26.529,154	21.427,424	67.956,740	
8	PT. Titan Wijaya	310.785,158	45.455,061	591.581,510	
9	PT. Bara Adhipratama	149.666,716	12.085,453	168.531,180	
10	PT. Rekasindo Gurian Tandan	00.00	546.356,025	595.905,49	
11	PT. Core Mineral Indonesia				
12	PT. Kaltim Global	00.00	357.194,852	437.545,670	
13	PT. Injatama	00.00	268.656,736	421.538,140	
14	PT. Bara Indah Lestari	423,310	322,518	3.327,97	

	Total Penjualan	762.548,011	2.164.919,059	3.631.968,645	
	Total Keseluruhan		2.927.467,070	3.631.968,645	

## **ANALISIS MASALAH**

### **Study Lapangan**

Penggalian di tingkat lapangan dilakukan oleh team Akar Foundation. Dan, wilayah yang menjadi konsentrasi pengalihan data adalah secara Adminsitratif berada di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah terutama diwilayah-wilayah yang bersingungan dengan wilayah konsesi Pertambangan Batu Bara, selain wilayah penghasil juga dilakukan kunjungan lapangan di *file stok* dan jalur angkut batu bara di Pelabuhan Pulau Baai dan dilakukan diskusi dengan beberapa pihak yang dianggap bisa berkontribusi terhadap kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan.

### **Kabupaten Bengkulu Utara**

Pada tanggal 12 September 1967 diterbitkan UU No. 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu, kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1968 tanggal 5 Juli 1968 tentang berlakunya UU No. 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu, pada saat Pembentukan Propinsi Bengkulu tersebut hanya terdapat 3 Kabupaten dan 1 Kota, dan Kabupaten Bengkulu Utara salah satu Kabupaten yang ada di Lingkup Propinsi Bengkulu.

Kabupaten Bengkulu Utara secara geografis terletak antara 101 0 32' – 102 0 8' BT dan 2 0 15' – 4 0 00' LS, dengan luas wilayah 5.548,54 km<sup>2</sup>. Secara administrasi, ibukota kabupatennya adalah Arga Makmur, yang terdiri dari 18 kecamatan, dengan batasan wilayah kabupaten yaitu:

Sebelah Utara ; Kabupaten Mukomuko  
Sebelah Selatan ; Kabupaten Saluma dan Kota Bengkulu  
Sebelah Timur ; Provinsi Jambi, Kabupaten Lebong  
dan Kapahiang  
Sebelah Barat ; Samudra Indonesia

Jalur transportasi menuju Kabupaten Bengkulu Utara dapat ditempuh melalui jalur darat dan laut. Jalur darat (lintas barat Sumatera) memegang peranan yang paling penting baik untuk angkutan barang maupun penumpang. Transportasi melalui jalur laut dapat ditempuh melalui pelabuhan Baai. Penggunaan lahan di Kabupaten Bengkulu Utara didominasi oleh lahan terbuka yaitu 200.951 Ha atau 36,22% dan lahan pemukiman merupakan lahan tersempit dengan luas 776,47 Ha atau 0,14 % dari luas kabupaten. Salah satu potensi alam yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB adalah sektor pertanian-perkebunan. Luas pertanian padi 34.071 Ha dengan produksi 89.973,3 ton, palawija 5.395 Ha dan perkebunan 76.684,24 Ha.

Secara fisik berada di wilayah Utara Bengkulu sebagian wilayahnya berada di wilayah perbukitan dan memanjang sepanjang bukit barisan, serta sebagian wilayahnya berada di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera, jumlah penduduk Bengkulu Utara 353.039 Jiwa terdiri dari Laki-laki 183.647 Jiwa, Perempuan 169.392 Jiwa dengan rasio Pertumbuhan Penduduk 3,24% dan Kepadatan Penduduk 63,63 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan Kepadatan Tertinggi 454,99 jiwa/Km<sup>2</sup> berada di Kecamatan Argamakmur.

Seperti halnya masyarakat Indonesia di daerah lainnya yang terdiri dari berbagai macam Suku bangsa dimana setiap Suku memiliki kebudayaan yang berbeda pula, begitu juga

halnya dengan masyarakat Bengkulu Utara. Selanjutnya masyarakat Bengkulu Utara ini kalau ditilik dari segi bahasanya dapat dibedakan atas beberapa golongan yaitu Serawai, Rejang, Rejang Pesisir, Enggano, Pekal dan Lembak serta suku pendatang (Jawa, Sunda, Bali, Batak dan Minang).

Masyarakat Suku Rejang, adalah merupakan suku terbesar di Kabupaten Bengkulu Utara. Masyarakat Suku Rejang ini dibagi dua yaitu Rejang Daratan yang bahasanya sama dengan masyarakat suku Rejang dari Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Lebong, yang pada umumnya mendiami di Kecamatan yang berbatasan dengan kedua daerah tersebut. Suku terbesar ke dua adalah Suku Jawa, yang mendiami di daerah Eks Transmigrasi yang sangat banyak dan tersebar di setiap kecamatan. Sedangkan Masyarakat Suku Rejang Pesisir adalah masyarakat Suku Rejang yang mendiami daerah disekitar pesisir, yaitu Kecamatan Kerkap, Lais, Batiknau, Air Napal, Air Besi dan sekitarnya. Masyarakat Suku Enggano adalah masyarakat yang mendiami di Pulau Enggano. Sedangkan Masyarakat Suku Pekal, adalah masyarakat yang mendiami di Kecamatan Ketahun, Putri Hijau dan Napal Putih. Masyarakat Suku Serawai adalah sebagaimana mendiami di wilayah Kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kabupaten Bengkulu Utara memiliki potensi kandungan batu bara yang cukup besar, Kandungan batu bara memiliki jumlah cadangan terukur sebanyak 175.847.898 ton, dari potensi yang ada tersebut hanya baru sekitar 25% yang diproduksi dan dipasarkan Potensi batubara yang menyebar di 12 kecamatan.

## **Bengkulu Tengah**

Bengkulu Tengah adalah Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara, aspirasi untuk pemekaran wilayah ini dituangkan dalam bentuk proposal yang disusun oleh Presidium, yang kemudian menjadi Keputusan DPRD Bengkulu Utara No. 31 Tahun 2005 serta Keputusan DPRD Bengkulu Utara No. 14 Tahun 2006 tanggal 28 April 2006 tentang Persetujuan calon lokasi Ibukota, nama Calon Ibukota Kabupaten Bengkulu Tengah. Dukungan terpenting dari Aspirasi ini adalah SK DPRD Propinsi Bengkulu No. 15/KPTS/DPRD-2006 tentang persetujuan DPRD Propinsi Bengkulu terhadap pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kabupaten Bengkulu Tengah terbentuk berdasarkan UU No. 24 tahun 2008 terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Taba Penanjung, Pagar Jati, Karang Tinggi, Talang Empat, Pematang Tiga dan Kecamatan Pondok Kelapa dengan total luas wilayah Administratif ± 1.223,94 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk ± 111.462 jiwa.

Secara fisik Kabupaten Bengkulu Tengah terletak pada posisi antara 10 10 32' - 10 20 8' BT dan 20 15' - 40 LS dan pada tahun 2012 terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan dan 142 Desa dan 1 Kelurahan. Kondisi topografi berdasarkan Geografic Information System (GIS) 1.223,94 Km<sup>2</sup> merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian mencapai 541 mdpl, dengan batas wilayah;

Sebelah Utara ; berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara  
dan Rejang Lebong  
Sebelah Timur ; berbatasan dengan Kabupaten Kapahiang

Sebelah Selatan ; berbatasan dengan Kabupaten Seluma  
dan Kota Bengkulu  
Sebelah Barat ; berbatasan dengan Samudera Hindia

Sebaran wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan topografi wilayah bergelombang dan berbukit dengan derajat kelerengan antara 5-35 %, wilayah yang relatif datar dengan tingkat kelerengan rata-rata 5 % terletak di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa dengan titik tertinggi hingga 541 mdpl berada di kawasan hutan lindung di perbatasan dengan Kabupaten Kepahiang, sedangkan wilayah terendah dengan ketinggian 0-15 m dpl berada di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa.

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki Kebudayaan dan adat istiadat yang beragam yang diwarnai oleh beberapa suku, penduduk asli Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Suku Rejang dan Lembak, saat ini ada banyak komunitas pendatang diantaranya Jawa, Sunda, Batak dan lain-lain. Suku Rejang umumnya berada di Kecamatan Taba Penanjung, Karang Tinggi, Pagar Jati dan Kecamatan Pematang Tiga sedangkan Suku Lembak berada di Kecamatan Talang Empat, Karang Tinggi dan Kecamatan Pondok Kelapa.

Bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari antar suku umumnya menggunakan bahasa Melayu dengan Logat Bengkulu sebagai bahasan komunikasi selain bahasa Indonesia, untuk komunikasi sesama suku menggunakan bahasan daerah masing-masing suku seperti Bahasa Rejang, Bahasa Lembak, Bahasa Serawai, Bahasa Jawa, Bahasa Sunda dan lain-lain. Pengaruh Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bengkulu Tengah masih sangat kental, hal ini terlihat seperti dalam upacara perkawinan, kesenian Syarafal

Annam dan Kesenian Rabana dan nyanyian-nyayian padang pasir lainnya.

Selain kuatnya struktur social, proses akulturasi kebudayaan adalah instrument mendukung penguatan pola interaksi sosial antara masyarakat local dan pendatang. Pluralism system social menjadi modal yang bisa di kapitalisasi dan menjadi modal dasar pembangunan di Bengkulu Tengah. Alam yang subur terkandung juga deposit Batu Bara yang tentu saja bermanfaat bagi pendukung system kehidupan rakyat yang hidup di Bengkulu Utara.

Cadangan Batu Bara di Kabupaten Bengkulu Tengah, seperti yang di ekspos Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah, kosentrasi terbesar cadangan batu bara berada di Kecamatan Taba Penanjung sebanyak 6.820.000 ton, total produksi dan penjualan batu bara di Bengkulu mencapai 3,2 juta ton pada 2011, Produksi terbesar dihasilkan PT Bukit Sunur dan PT Danau Mas Hitam yang mencapai rata-rata 20 ribu ton per bulan dan kedua Perusahaan ini berada di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Secara umum hasil kunjungan lapangan di dua Kabupaten Penghasil yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, dengan kalori rendah terdapat di Bengkulu Utara, sedangkan di Bengkulu Tengah masih ada yang kalorinya 6.000 keatas dan pada tahun 2012 produksi batu bara di Bengkulu 4 juta ton atau meningkat 800 ribu ton dari penjualan tahun 2011 sebesar 3,2 juta ton, ini menjadikan anggapan bahwa usaha pertambangan batu bara ini adalah bisnis paling menjanjikan saat ini.

Ironinya beberapa pihak yang ditemui baik masyarakat disekitar wilayah konsesi maupun Dinas Terkait menyatakan

keberadaan dan potensi batu bara belum memberikan kontribusi secara signifikan baik ditingkat Kabupaten Penghasil maupun bagi Pemerintahan Provinsi Bengkulu.

Fakta ini ditemukan tidak perbandingan antara jumlah produksi dan nilai jual beli batu bara besaran Penerimaan yang diterima daerah, jika di hitung atas persoalan yang diakibatkannya baik kerusakan infrastruktur yang digunakan sebagai jalur angkut maupun kerusakan lingkungan dan perubahan struktur sosial masyarakat sekitar.

Saat ini ada tujuh usaha tambangan batu bara beroperasi di Kecamatan Tabah Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu, dengan adanya perusahaan penambangan batu bara ini tentu memberikan dampak secara sosial ekonomi bagi masyarakat yang berdomisili di sekitar areal pertambangan batu bara di daerah tersebut, jika dilihat dari tingkat umur pekerjaan, tingkat pendidikan, jam kerja, jumlah tanggungan dan penghasilan tetap para pekerja terutama yang berdomisili di Kecamatan Tabah Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif (menggunakan tabel tabulasi frekuensi dan tabulasi silang), terutama pada sektor yang berkaitan dengan umur pekerja, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, pendapatan perbulan, dan tempat tinggal. Hasil diskusi Pekerja dengan di perusahaan batubara dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bengkulu tengah diambil secara acak diketahui bahwa pertambangan batubara di Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu tidak memberikan dampak yang berarti terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berdomisili disekitar areal pertambangan.



Bengkulu sedangkan Bengkulu Utara memiliki luas wilayah 4.424,60 km<sup>2</sup> atau seluas 22,36 dari luas Propinsi Bengkulu. Bagian Timur Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah adalah kawasan bukit barisan yang sebagaimana kawasan konsesi berdekatan dengan kawasan lindung, di dalam kawasan hutan tersebut memiliki beberapa spesies antara lain Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris, sumatraensis*), Orang Hutan Sumatera (*Pongo Pygmaues*), Kambing Hutan, Babi Hutan dan beberapa jenis burung serta beberapa tumbuhan jenis bambu seperti jenis Bambusa, *dendrocalamus*, *dinoshloa*, *gigantochloa*, dan terdapat juga 13 jenis rotan di antaranya Manau (*Calamus Manan*), sedikitnya 37 jenis tumbuhan obat di antaranya jenis Pulau (*Alstonia Scholaris*).

Jika dilihat dari bentang alam dan fungsi ekologi wilayah, beberapa wilayah konsesi ini berada di beberapa hulu DAS, selain Hulu DAS Bengkulu dan DAS Urai, pertambangan batu bara yang ada di Bengkulu Tengah juga mengancam Sub-sub DAS Air Pengambiran (sub DAS Kemumu) dan Sub DAS Durian yang merupakan bagian dari Sub DAS Hulu Bengkulu. Tentu saja dalam kawasan DAS tersebut terdapat keberadaan plankton, ini dapat dilihat dari indeks diversitas plankton di masing-masing sungai, indeks tertinggi terdapat di DAS Penun yang merupakan bagian dari DAS Hulu Bengkulu dan DAS Durian memiliki indeks terendah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Analisis Dampak Lingkungan Hidup PT Ratu Samban Mining, 2011

Selain perubahan bentuk DAS, proses eksploitasi ini juga melakukan kegiatan pengelupasan tanah, rata-rata tanah pada areal tambang yang dikelupas berkisar antara 13,50 meter dibawah permukaan tanah dengan rasio pengelupasan tanah penutup 1 : 13,5. Dari laporan Amdal PT Ratu Samban Mining saja diperkirakan volume tanah penutup yang dikupas pada tahun ke-1 dan tahun ke-9 sebesar 1.765.281 ton/tahun atau 5.884,27 ton/hari.

Akibat adanya kegiatan pertambangan tersebut, mengakibatkan dampak besar terhadap lingkungan. Hal ini dapat dilihat dengan hilangnya fungsi proteksi terhadap tanah akibat tidak adanya penutupan tajuk karena pengelupasan yang juga berakibat pada terganggunya fungsi-fungsi lainnya. Di samping itu, juga mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati (*gene pool*), terjadinya degradasi pada daerah aliran sungai, perubahan bentuk lahan, terjadinya peningkatan erosi, dan terlepasnya logam-logam berat yang dapat masuk ke lingkungan perairan. Jika hal ini dibiarkan, maka akan mengancam kehidupan manusia.

Menurut Jordan (1985), Intensitas gangguan dikategorikan ringan (apabila struktur dasar suatu ekosistem tidak terganggu, contohnya jika sebatang pohon besar mati dan kemudian roboh yang menyebabkan pohon lain rusak dan penebangan kayu yang dilakukan secara selektif dan hati-hati), moderat (apabila struktur hutannya rusak berat/hancur, namun produktifitasnya tanahnya tidak menurun, contohnya penebangan hutan primer untuk ditanami jenis tanaman lain seperti kopi, coklat, palawija dan lain-lainnya), dan berat (apabila struktur hutan rusak berat/hancur dan produktifitas tanahnya menurun, contohnya terjadi aliran lava dari gunung

berapi dan penggunaan peralatan berat untuk membersihkan hutan, seperti areal pertambangan). Berdasarkan ukurannya, gangguan dibagi menjadi gangguan kecil, sedang, dan besar. Sedangkan berdasarkan lamanya gangguan dapat diklasifikasikan menjadi gangguan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

### Kondisi Geologis dan Ancaman Ekologi



*Peta Sebaran Pertambangan di Propinsi Bengkulu*

Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah secara fisik berada di wilayah Utara Bengkulu dan berada di sepanjang garis pantai Barat Bengkulu dan sebagian wilayahnya berada di deretan bukit barisan yang terbentang dari Aceh hingga Lampung, kondisi ini membuat Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah memiliki hutan hujan tropis (tropical rain forest) terbaik di Sumatera dengan tingkat kekayaan hayati (flora dan fauna) yang cukup tinggi, dan

merupakan salah satu habitat terakhir bagi hewan mamalia besar Harimau Sumatera (*Panthera tigris, sumatraensis*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) dan lain-lain. Sebagai jenis mamalia besar yang dalam rantai makanan menduduki posisi *top carnivor* (pemakan daging utama), hewan ini sangat tergantung dengan rantai makanan (ekologis chain) dalam ekosistemnya, rusaknya habitat Harimau Sumatera (*Panthera tigris, sumatraensis*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) di Kabupaten Mukomuko akibat konversi lahan untuk perkebunan dan aktivitas pembukaan lahan secara langsung merusak keseimbangan ekologis di dalam habitatnya.

Dengan rusaknya keseimbangan ekologis dan rantai makanan di dalam habitatnya maka akan mengganggu perilaku alaminya (*natural behaviour*). Adalah sebuah konsekuensi logis ketika perilaku alami ini berubah menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar hutan, karena melalui mekanisme alami harimau akan mencari sumber makanan baru yang telah hilang dari habitat alaminya.

Hilangnya dan fragmentasi habitat saat ini akibat ekspansi pertambangan merupakan ancaman paling serius bagi kehidupan liar di seluruh dunia, sehingga menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana pola dan perubahan-perubahan yang terjadi pada bentang alam serta tanggapan satwa terhadap modifikasi alam ini. Proses spasial yang heterogen berpengaruh langsung terhadap system ekologi. Pengaturan spasial individu-individu dalam populasi akan merefleksikan aspek-aspek tingkah laku dan ekologi, dan ini penting

dalam menentukan keberadaan populasi dan lairan gen di dalam dan antar sub populasi).<sup>6</sup>

Sehingga, dinamika populasi satwa tidak hanya tergantung pada laju kelahiran dan kematian semata, tapi juga terhadap kemampuan satwa untuk bergerak masuk atau keluar populasi. Menentukan jumlah individu yang terdapat di suatu wilayah adalah merupakan pertanyaan paling mendasar dalam ekologi, tapi lebih penting lagi untuk dapat memahami bagaimana satwa memberikan respon terhadap perubahan kondisi bentang alam, terlepas ini berada pada tingkat individu, populasi, atau pun komunitas.<sup>7</sup>

Di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, dampak dari kebijakan otonomi daerah adalah factor yang terpenting yang sangat mempengaruhi perubahan bentangan geografis dan ancaman utama ekologis, kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber penghasil lainnya kemudian malakukan eksploitasi di berbagai sector ini terutama sektor pertambangan adalah pemicu utama kerusakan ekologis suatu wilayah, masuknya beberapa perusahaan pertambangan di kawasan buffer zone hutan yang merupakan sumber air beberapa DAS adalah contoh salah satu kasus kebijakan daerah yang lebih mementingkan aspek ekonomi belaka dibanding kelestarian suatu kawasan dan kepentingan ekologis wilayah.

Di Bengkulu misalnya saat ini hanya terdapat dua kantong gajah yang tersisa, yaitu Kelompok PKG Seblat (HPT Lebong Kandis-Hutan Produksi Air Rami), dan Kelompok Air

---

<sup>6</sup> Blumstein & Fernandez-Juricic 2004; Collinge 2010)

<sup>7</sup> Lawson et al.2006

Teramang. Sebelumnya pada tahun 1992 terdapat delapan kantong habitat gajah. Jumlah gajah liar yang ada di PKG Seblat saat ini diperkirakan sekitar 60-80 ekor. Selain itu juga terdapat 21 ekor gajah binaan dan terdapat flora dan satwa lainnya seperti tapir, harimau sumatera, beberapa jenis primata dan berbagai jenis burung. Populasi gajah Sumatera di Provinsi Bengkulu terus menurun. Jika data tahun 2001 menunjukkan populasi gajah Sumatera sebanyak 200 hingga 400 ekor, kini tinggal 100 ekor. Populasi saat ini tidak lebih dari 100 ekor, dalam kurun waktu 7 tahun kalau kita pakai data terkecil yang 200 ekor, nanti tahun 2014 gajah Sumatera akan punah, dan kalau kita pakai data 400 ekor, Gajah sumatera akan punah pada tahun 2011 seperti yang dilansir oleh beberapa media local dan nasional.

Dari kondisi ini kemudian terdapat tiga ciri utama dari blunder kebijakan (*policy failure*) di sektor kehutanan dan pertambangan yang berdampak pada perubahan bentang dan ancaman ekologis di Bengkulu. Pertama, kebijakan tersebut mendewakan sistem open ground atau pertambangan terbuka, pola ini jelas mengingkari keanekaragaman hayati hutan Indonesia, memberikan harga yang rendah (*undervalued*) serta membahayakan fungsi hutan sebagai sumber pangan Indonesia. Kedua, menggunakan pendekatan masif. Seiring dengan dibukanya kran investasi besar-besaran, maka pengelolaan hutan selalu ditekankan dengan skala masif. Akibatnya terjadi perubahan bentang alam besar-besaran dalam waktu singkat, yang tidak memberikan kesempatan bagi lahan tersebut untuk memulihkan dirinya (*self-recovery*). Ketiga, tidak berpihak kepada rakyat banyak. Ini ditandai dengan tidak adanya perlindungan dan pengharagaan terhadap

ekonomi rakyat yang berskala kecil. Rakyat tidak dapat lagi mengelola hasil hutan, seperti madu, damar ataupun getah, karena mereka tidak diperbolehkan masuk ke areal kawasan Hutan ataupun Pertambangan. Padahal mereka ada lebih dahulu dari para pengusaha tersebut.

Akibat utama dari blunder kebijakan di atas adalah, kerusakan lingkungan seketika dan bersifat akumulatif seperti terjadinya banjir dan longsor, pencemaran sumber air, dan untuk jangka waktu panjang merusak fungsi hutan sebagai lumbung makanan, obat-obatan dan penyerap karbon (*carbon-sink*) dunia yang diyakini sebagai salah satu penyebab terganggunya iklim di dunia.

Rusaknya tatanan sosial masyarakat yang hidupnya bergantung pada pengelolaan hutan. Ketika secara paksa dan mendadak mereka harus kehilangan akses terhadap sumber daya hutan, maka mereka dimiskinkan secara paksa. Keahlian yang mereka punyai dalam meramu dan mengelola sektor kehutanan menjadi tidak terpakai. Akibatnya mereka kehilangan mata pencahariannya dan kehilangan kemampuan untuk mengurus keluarganya. Secara kumulatif, kejadian di atas akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di suatu region dan menghasilkan generasi yang bingung dan tidak mampu beradaptasi dengan suasana baru.

Terjadi pula pelanggaran hak asasi manusia dalam pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah milik publik, yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Ketika koncoisme dalam pengelolaan SDA terjadi, maka terjadi pula pengingkaran atas barang publik tersebut. Lebih jauh, setiap “penyelesaian” sengketa sumber daya alam selalu dibarengi intimidasi dan kekerasan oleh

negara. Usaha menyelesaikan sengketa secara damai dan tanpa kekerasan belum pernah direspon dengan baik oleh pihak negara.

Dari proses ‘provokasi’ dan pengusasaan wilayah atas nama investasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, wilayah-wilayah konservasi dan kelola rakyat kemudian di alihfungsikan menjadi wilayah pertambangan membuat masyarakat mulai mengakses wilayah-wilayah yang di lindungi karena kebutuhan ekonomis. Rusaknya hulu DAS Bengkulu merupakan akibat buruk yang kemudian menyebabkan terjadinya bencana ekologis seperti banjir dan dominasinya species hama tertentu akibat rusaknya habitat ekologis.

### **Perkembangan Kelembagaan, Sosial Dan Budaya**

Secara kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat di desa-desa yang menjadi sasaran penelitian yang berperan sangat penting adalah kepala adat atau kepala suku dimana sebagian besar masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan adalah Suku Rejang baik yang ada di Bengkulu Tengah maupun Bengkulu Utara selain Suku Pekal Ipuh di wilayah Ketahun, biasanya pemilihan kepala desa atau pimpinan formal lainnya haruslah mendapatkan rekomendasi dari kepala adat, ketua suku/kepala suku dipilih langsung oleh komunitas warganya dengan beberapa pertimbangan peran-peran paternalistic dominant dikemudian hari dalam proses demokrasi di kampung.

Komunitas Rejang ini dikepalai oleh Kepala Adat, kepala adat/suku ini dipilih oleh Warga adat/suku beserta para sesepuh adat/suku, dalam sejarah adat Kepala adat/suku

berfungsi sebagai mediasi beberapa persoalan yang ada baik didalam komunitas adat/suku maupun dengan adat/suku dengan yang lain, persoalan ini biasanya diselesaikan dengan mengacu pada *adat pegang pakai*. Secara politik Kepala adat/suku berperan sebagai negosiator dengan pihak lain misalnya dengan Pemerintahan Desa, dan bertanggung jawab penuh atas anak-anak atau warga adat/sukunya serta bertanggung jawab atas *pinta kinai*, kesepakatan atas sistem hubungan keluarga/clan yang mengacu pada *berjenjang naik bertanggo turun* atau *kenek ne pado adat tu'un ne pado baso*.

Masing-masing adat/suku yang ada di Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah yang biasa disebut dengan Rejang Pesisir biasanya memiliki 1 buah Surau yang berfungsi sebagai tempat rapat adat/suku dan tempat belajar agama, sistem sosial yang masih dilakukan sampai saat ini adalah gotong royong, sistem ini biasa dilakukan dalam kaum disebut *tong royong* atau gotong royong adat/suku, sedangkan gotong royong antar adat/suku gotong royong *negeri* dan biasanya di komandoi oleh Kepala Desa.

Pada dekade 1970-an wilayah yang berada di Kecamatan Taba Penanjung Bengkulu Tengah pernah menjadi lumbung padi di Kabupaten Bengkulu dan dipercayai oleh warga Suku Rejang sebagai wilayah asal Dewi Padi, ketika itu jenis padi yang ditaman adalah varietas lokal dalam pengelolaan SDA bisanya dilakukan menjemput *semangat padi* (ritual adat dalam mengumpulkan yang *teserak tesirai*) dalam menanam padi, dan ketika padi berumur 1 bulan masyarakat warga biasanya melakukan ritual, pada saat jemput *semangat padi* menjelang panen kembali dilakukan ritual adat dengan ritual sebagai penghatam *rampung semangat padi*

kemudian dilanjutkan dengan acara makan-makan atau *panen raya*.

Terhadap hak kepemilikan atas sumber daya di atas lahan biasanya dipasang tanda *besulo* (tanda-tanda tertentu), sementara sistem bagi hasil biasanya dikenal dengan buah adat pada masa-masa panen biasanya ada *larangan negeri*, dimana masing-masing pihak bergiliran memanen yang di koordinir oleh Kepala adat/suku dan Pemerintahan Desa ini merupakan aplikasi atas apresiasi warga adat/suku kepada pengurus adat/suku.

Sebagian besar Masyarakat Rejang yang ada di Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah masih meyakini adanya kekuatan gaib diluar kemampuan manusia, sehingga dalam membuka hutan dilakukan ritual untuk meminta izin kepada penguasa gaib di hutan terutama untuk mendapatkan keselamatan dalam mengelola lahan, aktivitas yang dilakukan ini disebut *do'a buka rimbo*.

Pada saat ini ada pergeseran pada tataran implementasi atas penyesuaian intervensi dari sistem luar misalnya Pemerintahan Desa, dimana Kepala Desa merangkap sebagai Kepala Adat, Dalam sistem pemerintahan ada pembagian wewenang antara pemerintahan adat dengan Pemerintahan Desa, tetapi ada wewenang lebih Kepala Desa atas konsekwensi adminsitratif.

Sangsi-sangsi adat bisanya mengacu pada kesepakatan antar adat/suku itu sendiri seperti yang tercantum dalam aturan adat, *pat sepakat lemo sempurno*. Bentuk sangsi yang paling berat yang diberikan terhadap konsekwensi suatu perbuatan yang dianggap tercela, dalam penyelesaian sengketa yang terjadi Kepala adat/suku bertindak sebagai pembela bagi warga

adat/sukunya, dan kepala desa sebagai payung adat dalam kasus adat sering bertindak sebagai mediasi yang ditemani oleh sesepuh adat sebagai tempat konsultasi dalam memberikan keputusan adat.

UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa berimplikasi langsung dengan system kelembagaan social sehingga memaksakan kelembagaan local melakukan penyesuaian dengan mengenalisir beberapa aturan local, penghancuran struktur local ini tidak hanya akibat kebijakan Pemerintahan Desa yang sentralistik namun sentralistik kebijakan dan demokrasi otonomi di dalam bidang perkebunanpun tidak membawa perkembangan yang berarti dari aspek kelembagaan, social dan ekonomi masyarakat komunitas kaum yang bersinggungan dengan sumber-sumber daya alam yang dikelola oleh pemilik modal dengan membuat konsesi pertambangan.

Persoalan ini dapat dilihat dari system pertambangan yang masih diliputi oleh dualisme ekonomi, yaitu antara pertambangan yang menggunakan padat modal dan teknologi secara intensif dan menggunakan lahan secara ekstensif serta manajemen eksploitatif terhadap SDA dan SDM, dan disatu sisi membuat rakyat tersubsisten atas luas lahan terbatas, kedua sistem ini menguasai bagian tertentu dari masyarakat dan keduanya hidup berdampingan, perbedaan keduanya tidak jarang menimbulkan konflik ekonomi yang berkembang menjadi konflik social sehingga peran-peran kelembagaan adat atau adat/suku tidak bisa masuk ke wilayah-wilayah yang mengaplikasi manajemen eksploitasi ini.

Konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan beberapa perusahaan pertambangan merupakan dampak

perbedaan system antar keduanya yang merupakan aplikasi dari hak mengusainya Negara atas tanah dan kemudian memberikan sebagai hak menguasai itu kemudian menjadi Hak konsesi untuk usaha pertambangan, sementara di satu sisi ketidak pastian hak masyarakat yang hidup secara turun temurun diwilayah tersebut (masyarakat adat dengan tenurial geneologisnya) tidak pernah diselesaikan dengan baik malah dilakukan pemaksaan nilai-nilai dan intimidasi dalam prosesnya.

Masuknya pemodal dalam sector pertambangan ternyata tidak memberikan kontribusi pada tingkat kesejahteraan masyarakat setempat, dari wawancara dengan Kepala Desa Skayu dan Pematang Tiga saja dapat diketahui bahwa hampir 80 % masyarakatnya adalah bekerja sebagai buruh tani yang tentunya dengan pendapatan jauh di bawah standar hidup layak. Hingga saat inipun masih belum ada distribusi aset dan manfaat dari hasil usaha pertambangan terhadap masyarakat desa, jika adapun hanya untuk kepentingan social seperti bantuan kepada tempat ibadah (sumbangan masjid) itu melalui mekanisme yang rumit yang sering diklaim oleh perusahaan sebagai bentuk *Corpoorated Social Responsibility (CSR)*.

### **Masalah Kelembagaan**

Persoalan utama kelembagaan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah khususnya kelembagaan masyarakat yang bersentuhan dengan wilayah konsesi pertambangan, khususnya *Corpoorated Social Responsibility (CSR)* sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan bagi masyarakat sekitar, dari study yang

dilaksanakan oleh Akar Foundation ada beberapa hal yang menjadi persoalan utama masyarakat yang bersentuhan dengan masalah kelembagaan ini, antara lain;

1. Penggunaan Tanah (Land Use), proses ini akibat dari masih berlakunya hak ketuantanahan sehingga system kepemilikan atas tanah tidak merata dan kebanyakan petani hanya sebagai buruh tani atau petani sebagai pengelola
2. Lembaga pengkreditan atau utang piutang masih bersipat pribadi yang menguntungkan si peminjam dengan ketentuan bunga tinggi
3. Mobilitas social vertikal masih rendah karena mereka tidak memiliki kemampuan lebih untuk bergerak diluar apa yang diketahuinya
4. Belum berkembangnya kewirausahaan dan rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan

Kelembagaan petani yang sebagian besar hidup di sekitar pertambangan masih lemah, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Lemahnya secara kelembagaan terjadinya karena intervensi yang berlebihan dari pemerintah, terutama dengan pembentukan KUD-KUD yang justru banyak merusak tatanan kelembagaan masyarakat. Di satu sisi memang dukungan permodalan dan investasi yang kurang mendukung, terutama Kelembagaan yang menjamin keberpihakan kepada petani masih lemah, salah satu alasannya adalah anggapan bahwa petani tidak mampu untuk mengembangkan usahanya secara ekonomis.

### **Masalah Social Kultural (Social Budaya)**

Pembangunan sektor Pertambangan tidak hanya berdampak pada keberlanjutan lingkungan itu sendiri tapi lebih jauh berkontribusi pada penghancuran struktur-struktur social yang ada dan berkembang di masyarakat, di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah saja ada beberapa persoalan yang memicu terjadinya konflik social di daerah pertambangan, antara lain adalah;

1. Tidak berkolerasinya alokasi lahan dengan laju pertumbuhan penduduk, sebagian besar penduduk ini bermata pencarian sebagai petani dan pengarang di satu sisi terjadinya dominasi lahan oleh pemilik modal, ketimpangan ini mulai tampak dengan perbandingan luasan kepemilikan lahan oleh masyarakat seluas rata-rata 1-2 Ha dan pemilik modal sampai 100-an Ha
2. Adanya tatanan kebijakan agrarian yang tidak kompatibel dengan perkembangan dan kondisi masyarakat, kerancuan ini dapat dilihat dari benturan kebijakan nasional dengan kebijakan di daerah tentu saja dengan basis argument dan atas nama otonomi daerah
3. Terjadinya *bundle of rights* atau kepemilikan ganda atas objek tanah yang sama baik itu antar masyarakat dengan pertambangan maupun antara masyarakat dengan kawasan konservasi
4. Belum adanya kepastian hukum atas kepemilikan lahan oleh masyarakat sehingga bias saja dikoptasi sebagai wilayah Negara yang kapan saja bias di alih fungsikan maupun dicabut hak atas kepemilikannya
5. Makin kompetitifnya alternative kepemilikan lahan terutama untuk kebutuhan lahan pemukiman

## **GAMBARAN KONGKRIT (ANALISIS PENDAPATAN)**

### **Informasi Kuantitatif**

Dari data yang di dapati di Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah terdapat 26 perusahaan Batu Bara, masing-masing di Bengkulu Utara terdapat 16 Perusahaan dan 10 perusahaan berada di Kabupaten Bengkulu Tengah.

### **Data Perusahaan yang ada di Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah**

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Lokasi Eksploitasi</b>
1	PT. Bukit Sunur	Bengkulu Tengah
2	PT. Kusuma Raya Utama	Bengkulu Tengah
3	PT. Core Mineral Indonesia	Bengkulu Utara
4	PT. Rekasindo Guriang Tandang	Bengkulu Utara
5	PT. Kaltim Global	Bengkulu Utara
6	PT. Inti Bara Perdana	Bengkulu Tengah
7	PT. Bara Indah Lestari	Bengkulu Utara
8	PT. Indonesia Riau Sri Avantika	Bengkulu Utara
9	PT. Ratu Samban Mining	Bengkulu Tengah
10	PT. Titan Mining Indonesia	Bengkulu Utara
11	PT. Bara Adhipratama	Bengkulu Utara
12	PT. Danaumas Hitam/CS	Bengkulu Tengah
13	PT. Danaumas Hitam/Borneo	Bengkulu Tengah
14	PT. Danaumas Hitam/MAS	Bengkulu Tengah
15	PT. Danaumas Hitam/MK	Bengkulu Tengah
16	PT. Injatama	Bengkulu Utara
17	PT. Lahat Centra Coalindo/LCC	Bengkulu Utara

18	PT. Farming Lefto	Bengkulu Utara
19	PT. Firman Ketahun	Bengkulu Utara
20	PT. Ferti Rejang	Bengkulu Utara
21	PT. Mitra Niaga Sejati	Bengkulu Utara
22	PT. Panca Makmur Bersama	Bengkulu Utara
23	PT. Sanfak Jaya Marine	Bengkulu Utara
24	PT. Bara Sirati Unggul Permai	Bengkulu Tengah
25	PT. Mitra Padjajaran Prima	Bengkulu Utara
26	PT. Dinamika Selaras Jaya	Bengkulu Utara

Sementara Pada tahun 2011 terjadi kenaikan Data Produksi dan Penjualan/Pengapalan Batu Bara di Bengkulu sebesar 3.631.968,645 Ton dengan rincian sebagai berikut;<sup>8</sup>

No	Perusahaan	Penjualan		Produksi (Ton)	Keterangan
		Dalam Negeri	Luar Negeri		
1	PT. Ratu Samban Mining	0,00	292.091,408	313.204,850	Penjualan luar negeri
2	PT. Bukit Sunur	25.717,429	65.968,654	103.611,904	Jepang, Srilangka, India, China dan Korea
3	PT. Inti Bara Perdana	16.138,434	84.210,894	109.669,510	Malaysia, Thailand dan Philipina
4	PT. Kusuma Raya Utama	54.332,414	150.334,195	233.911,580	

<sup>8</sup> Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu, 2011

5	PT. Danau Mas Hitam	117.082,791	252.889,686	468.108,031	
6	PT. Indonesia Riau Sri Avantika	61.872,605	67.926,153	117.076,070	
7	PT. Firman Ketahun	26.529,154	21.427,424	67.956,740	
8	PT. Titan Wijaya	310.785,158	45.455,061	591.581,510	
9	PT. Bara Adhipratama	149.666,716	12.085,453	168.531,180	
10	PT. Rekasindo Gurian Tandan	00.00	546.356,025	595.905,49	
11	PT. Core Mineral Indonesia				
12	PT. Kaltim Global	00.00	357.194,852	437.545,670	
13	PT. Injatama	00.00	268.656,736	421.538,140	
14	PT. Bara Indah Lestari	423,310	322,518	3.327,97	
	Total Penjualan	762.548,011	2.164.919,059	3.631.968,645	
	Total Keseluruhan		2.927.467,070	3.631.968,645	

Dari data yang di keluarkan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu, hasil eksploitasi dan pembayaran yang dilakukan melalui beberapa Bank, sehingga hasil dari batu bara tersebut dapat dilihat dari data data realisasi pembayaran royalti tetap atau royalti pertambangan pada

triwulan I tahun 2011 total untuk Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah sebesar Rp. 11.737.508.843, masing-masing dirincikan sebagai berikut;<sup>9</sup>

Tabel; Daftar Realisasi Pembayaran Royalti dan Rendrent pada Triwulan I tahun 2011

No	Kabupaten	Landrent		Royalti	
		Rp	US \$	Rp	US \$
<b>1</b>	<b>Bengkulu Utara</b>				
		23.750.000		151.731.766	28.929
		9.785.000		162.867.110	14.670
		3.680.000		136.155.625	14.420
		11.712.500		1.055.563.080	
		249.949.725		1.162.070.458	
		5.100.000		167.167.903	
		5.100.000		73.911.100	
		23.025.000		610.928.572	
				7.339.138	
				11.209.268	
				12.230.689	
				53.690.830	
				133.900.972	
				237.659.985	
				7.676.817	
				45.224.958	
				105.842.564	
				133.105.758	
		1.002.609.063			
		117.628.050			
	<b>Sub-Total</b>	<b>332.102.225</b>		<b>5.388.513.706</b>	<b>58.019</b>

<sup>9</sup> Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu, 31 Meret 2011

2	<b>Bengkulu Tengah</b>				
		22.300.000		252.865.300	12.068,88
		13.948.575		183.162.500	12.319,20
		24.875.000		183.162.500	61.479,00
				412.614.386	27.192,00
				114.124.900	20.872,00
				356.300.715	92.808,00
				358.450.700	22.430,00
				357.670.900	90.472,00
				1.332.284.744	29.000,00
				568.105.369	25.085,10
				179.688.500	17.959,68
				336.433.215	22.312,59
				78.397.200	
				14.857.353	
				362.374.483	
				212.050.404	
		248.274.900			
		253.942.200			
	<b>Sub-Total</b>	<b>61.123.575</b>	<b>6.348.995.137</b>	<b>433.998</b>	
	<b>T O T A L</b>	<b>393.225.800</b>	<b>11.737.508.843</b>	<b>492.017</b>	

- Sedangkan pada triwulan ke II total jumlah Royalti yang di dapati sebesar Rp. 13.408.400.469 dan US \$. 722.527,07 sedangkan Landrent sebesar Rp. 52.061.632, dengan rincian seperti pada tabel berikut;<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu, 30 Juni 2011

Tabel; Daftar Realisasi Pembayaran Royalti dan Landrent pada Triwulan II tahun 2011

No	Kabupaten	Landrent		Royalti	
		Rp	US \$	Rp	US \$
1	Bengkulu Utara				
		5.800.000		461.084.611	28.474,00
		13.624.000		1.215.176.785	14.115,00
		5.390.675		236.291.382	6.514,00
		14.472.000		10.793.276	18.948,00
				7.493.294	
				4.210.398	
				7.499.375	
				5.518.355	
				3.463.577	
				4.238.462	
				176.337.706	
				186.892.289	
				16.114.955	
				130.884.750	
				171.074.358	
				1.487.812.500	
				171.693.984	
				189.531.884	
				347.447.664	
				181.178.640	
				232.970.582	
				127.373.778	
				113.435.654	
				153.789.408	
				149.355.930	
	<b>Sub-Total</b>	<b>39.286.675</b>		<b>5.791.663.597</b>	<b>68.051,00</b>

<b>2</b>	<b>Bengkulu Tengah</b>				
		12.774.957		185.650.000	30.915,00
				333.655.376	77.647,00
				1.065.626.386	23.861,64
				1.443.365.784	9.579,14
				232.791.900	2.804,87
				277.711.850	2.965,07
				1.918.381.278	25.731,89
				332.238.350	27.205,03
				311.667.506	13.060,00
				278.185.950	82.526,00
				912.980.692	25.701,89
				324.481.800	50.924,00
					62.661,00
					18.453,35
					6.326,44
					165.477,00
					28.636,75
	<b>Sub-Total</b>	<b>12.774.957</b>		<b>7.616.736.872</b>	<b>654.476,07</b>
	<b>T O T A L</b>	<b>52.061.632</b>		<b>13.408.400.469</b>	<b>722.527,07</b>

- Sedangkan pada triwulan ke III total jumlah Royalti yang didapati sebesar Rp. 20.152.287.133 dan US \$. 426.504 sedangkan Landrent sebesar Rp. 202.329.970 dengan rincian seperti pada tabel berikut;<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu, 30 September 2011

Tabel; Daftar Realisasi Pembayaran Royalti dan Landrent pada Triwulan III tahun 2011

No	Kabupaten	Landrent		Royalti	
		Rp	US \$	Rp	US \$
1	Bengkulu Utara				
		5.000.000		201.502.967	11.355,00
		23.025.000		20.498.570	7.758,00
				185.603.076	40.464,00
				55.386.943	
				29.492.891	
				232.092.284	
				26.999.556	
				216.146.385	
				212.258.248	
				192.340.727	
				202.794.781	
				214.929.049	
				192.225.589	
				1.517.237.561	
				1.406.480.851	
				1.097.499.423	
				1.200.681.885	
				190.632.961	
				207.905.021	
				171.413.964	
				206.572.174	
				211.857.602	
				210.279.485	
				216.462.698	
				194.074.466	
				189.994.471	
				1.380.468.325	
				128.293.313	
				167.380.544	
				217.554.900	
				162.537.824	

				3.250.756	
				229.181.476	
				4.583.629	
				1.542.690.446	
				189.707.733	
	<b>Sub-Total</b>	<b>28.025.000</b>		<b>13.029.012.574</b>	<b>59.577,00</b>
<b>2</b>	<b>Bengkulu Tengah</b>				
		1.750.000		331.208.600	11.355,00
		13.973.700		332.529.900	111.300,00
				244.636.300	8.457,00
				596.769.679	51.277,00
				565.939.365	9.140,04
				367.968.195	15.370,00
				373.877.595	38.128,00
				564.205.687	
				188.600.700	
				243.255.400	
				452.146.600	
				198.090.500	
				636.029.700	
				617.371.500	
				450.862.300	
				151.797.900	
				147.332.000	
				24.039.146	
	<b>Sub-Total</b>	<b>15.723.700</b>		<b>6.486.661.067</b>	<b>245.027,04</b>
	<b>T O T A L</b>	<b>43.748.700</b>		<b>19.515.673.641</b>	<b>304.604,04</b>

- Sedangkan pada triwulan ke IV total jumlah Royalti yang didapati sebesar Rp. 19.515.673.641 dan US \$. 304.604,04 sedangkan Landrent sebesar Rp. 43.748.700 dengan rincian seperti pada tabel berikut;<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu, 30 Desember 2011

Tabel; Daftar Realisasi Pembayaran Royalti dan Rendrent pada Triwulan IV tahun 2011

No	Kabupaten	Landrent		Royalti	
		Rp	US \$	Rp	US \$
1	Bengkulu Utara				
		5.000.000		201.502.967	11.355,00
		23.025.000		20.498.570	7.758,00
				185.603.076	40.464,00
				55.386.943	
				29.492.891	
				232.092.284	
				26.999.556	
				216.146.385	
				212.258.248	
				192.340.727	
				202.794.781	
				214.929.049	
				192.225.589	
				1.517.237.561	

				1.406.480.851	
				1.097.499.423	
				1.200.681.885	
				190.632.961	
				207.905.021	
				171.413.964	
				206.572.174	
				211.857.602	
				210.279.485	
				216.462.698	
				194.074.466	
				189.994.471	
				1.380.468.325	
				128.293.313	
				167.380.544	
				217.554.900	
				162.537.824	
				3.250.756	
				229.181.476	

				4.583.629	
				1.542.690.446	
				189.707.733	
	<b>Sub-Total</b>	<b>28.025.000</b>		<b>13.029.012.574</b>	<b>59.577,00</b>
<b>2</b>	<b>Bengkulu Tengah</b>				
		1.750.000		331.208.600	11.355,00
		13.973.700		332.529.900	111.300,00
				244.636.300	8.457,00
				596.769.679	51.277,00
				565.939.365	9.140,04
				367.968.195	15.370,00
				373.877.595	38.128,00
				564.205.687	
				188.600.700	
				243.255.400	
				452.146.600	
				198.090.500	
				636.029.700	

				617.371.500	
				450.862.300	
				151.797.900	
				147.332.000	
				24.039.146	
	<b>Sub-Total</b>	<b>15.723.700</b>		<b>6.486.661.067</b>	<b>245.027,04</b>
	<b>T O T A L</b>	<b>43.748.700</b>		<b>19.515.673.641</b>	<b>304.604,04</b>

Dari data yang terdapat ditabel dari triwulan pertama sampai dengan triwulan IV pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut;

#### Kabupaten Bengkulu Utara

No	Keterangan	Landrent		Royalti	
		Rp	US \$	Rp	US \$
1	Triwulan I	332.102.225		5.388.513.706	58.019
2	Triwulan II	39.286.675		5.791.663.597	68.051
3	Triwulan III	59.929.665		13.912.149.068	36.169
4	Triwulan IV	28.025.000		13.029.012.574	59.577
	<b>TOTAL</b>	<b>459.343.565</b>		<b>38.121.338.945</b>	<b>221.816</b>

## Kabupaten Bengkulu Tengah

No	Keterangan	Landrent		Royalti	
		Rp	US \$	Rp	US \$
1	Triwulan I	61.123.575		6.348.995.137	433.998
2	Triwulan II	12.774.957		7.616.736.872	654.476,07
3	Triwulan III	142.400.305		6.240.138.065	390.335
4	Triwulan IV	15.723.700		6.486.661.067	245.027,04
	<b>TOTAL</b>	<b>232.022.537</b>		<b>26.692.531.141</b>	<b>1.723.836,24</b>

Dari realise yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bengkulu menyatakan bahwa pendapatan royalti dari penjualan tersebut sebesar 85 miliar dari penjualan 3,2 juta ton batu bara yang kemudian dibagi untuk daerah 80 % dan 20 % untuk Pemerintahan Pusat, dari 80 % yang dialokasikan untuk Daerah kemudian dibagi untuk Pemerintahan Propinsi sebesar 16 %, untuk kabupaten Penghasil sebesar 32 % dan 32 % sisanya untuk kabupaten yang ada di dalam Propinsi Bengkulu.

Jika dihitung dari total pendapatan dari pembayaran Landrent dan Royalti yang didapati oleh Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp. 40.687.934.510, maka pendapatan untuk Pemerintahan Pusat sebesar 20 % maka nominal yang didapati sebesar Rp. 8.137.586.902, sedangkan untuk daerah sebesar 80 % maka nominal yang didapati Rp. 32.550.347.608. Pendapatan untuk Daerah (Pemerintahan Propinsi Bengkulu) sebesar Rp. 32.550.347.608. jika dibagi untuk Pemerintahan Propinsi Bengkulu sebanyak 16 %, maka didapati nominal sebesar Rp. 6.510.069.522, maka sebanyak 32 % didapati oleh Kabupaten Bengkulu Utara atau sebesar Rp. 13.020.139.043. dan sisanya sebesar Rp. 13,020.139.043 dialokasikan untuk 9 Kabupaten/kota yang ada di Bengkulu,

artinya masing-masing Kabupaten mendapatkan Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 1.446.682.116.

Sedangkan pendapatan hasil dari eksploitasi dan pembayaran landrent dan royalti dari wilayah Bengkulu Tengah, pada tahun 2011 sebesar Rp. 43.300.997.958, maka pendapatan Untuk Daerah (Dana Bagi Hasil) yang didapati oleh Pemerintahan Propinsi Bengkulu sebesar Rp. 34.640.798.366, sedangkan bagian untuk Pemerintahan Pusat sebesar Rp. 8.660.199.592. dari pendapatan (Dana Bagi Hasil) sebesar Rp. 34.640.798.366, maka Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Kabupaten Penghasil mendapatkan Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 13.856.319.347, sedangkan Pemerintahan Propinsi mendapat Rp. 6.928.159.673, maka bagian untuk 9 kabupaten/kota yang ada di Bengkulu masing-masing mendapatkan Rp. 1.539.591.039.

Dan ketika data ini dikonfirmasi kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Bengkulu, tidak ada bantahan, dan menurut mereka bahwa data tersebut tidaklah jauh berbeda dengan hitungan yang ada di DISPENDAN dan Dinas ESDM, begitu juga ketika dikonfirmasi kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten (DPPKAD) Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah yang tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah, menyatakan hal yang sama bahwa pendapatan dari Dana Bagi Hasil tersebut untuk tahun 2011 angkanya tidak jauh berbeda dari hitungan di atas, tetapi tidak ada penjelasan yang lebih lanjut dan detail.

## **Informasi Kuantitatif**

Dari setoran royalti seperti yang disebutkan di atas baik yang diterima Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu maupun Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, diyakini oleh beberapapihak masih jauh dari potensi riil pendapatan yang seharusnya diterima. Pasalnya selama ini ternyata tidak ada satu pihakpun, yang melakukan pengawasan terhadap distribusi dan jumlah batubara yang keluar dari Bengkulu, baik administrator pelabuhan ataupun Dispenda Provinsi, yang sama-sama tidak mengetahui dan mengaku tidak memiliki kewenangan, untuk mengawasi setiap jumlah batubara yang keluar. Padahal pembagian royalti, akan sangat bergantung pada jumlah batubara yang dikeluarkan para pengusaha batu bara. Fakta ini tentu mengejutkan, pasalnya dari pengakuan PELINDO aktivitas ekspor batu bara ternyata juga tidak hanya dilakukan dari kawasan Pulau Baai. Dari kontak person Akar Foundation yang ada di Pelindo masih ada satu pelabuhan swasta lain di Bengkulu Utara, yang selama ini sudah beroperasi melakukan bongkar muat batu bara, tanpa pernah melaporkan jumlah batubara yang dikirim, jumlah inilah yang diyakini lepas dari pengamatan selama ini, dan sangat berpeluang pada hilangnya potensi Pendapatan yang seharusnya masuk kedalam skeme Dana Bagi Hasil.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan produksi batu bara sebesar 4,5 juta ton pada 2013 atau meningkat 12,5% dari produksi pertahunnya. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Bengkulu Karyamin mengatakan batu bara memang telah menjadi komoditas andalan provinsi itu, dia menyebutkan bahwa tren peningkatan Produksi karena banyaknya pengusaha yang menggarap tambang batu bara di

Bengkulu, tren peningkatan produksi itu terlihat selama 2 tahun terakhir. Pernyataan ini kemudian dikuatkan oleh Pelindo Pelabuhan Pulau Baai bahwa pengapalan batubara melalui Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu tiga tahun terakhir terus meningkat, sehubungan tingginya permintaan batu bara di pasar internasional, pada tahun 2011 mengapalkan batubara sebanyak tiga juta ton, naik dari sebelumnya hanya 2,2 juta ton yang diangkut ke berbagai Negara. Asumsi hitungannya adalah pengapalan batubara itu pada 2009 tercatat 1,4 juta ton, dengan demikian setiap tahun terjadi kenaikan pengiriman, meskipun kondisi alur pelabuhan dangkal karena pengangkutannya menggunakan tongkang berkapasitas 30 ton.

Pada 2011, produksi batu bara sebanyak 3,5 juta ton, kemudian meningkat jadi 4 juta ton pada 2012 kemudian ditargetkan 4,5 juta ton pada 2013 tren peningkatan ini tentu saja berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya, karena anggapan Pemerintahan Daerah bahwa salah satu investasi strategis di Bengkulu adalah Batu Bara disamping sektor perkebunan, konsentrasi yang awalnya hanya ada di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Saat ini ada 100 izin eksplorasi pertambangan, terutama tambang batu bara karena potensinya yang paling besar yang tersebar di 9 Kabupaten yang adadi Bengkulu. Dari hasil penelitian, cadangan batubara di Bengkulu mencapai 161,53 juta, terdiri dari tereka 59,82 juta ton dan terunjuk 29,98 ton serta terukur 71,72 ton.

Dan secara politik terjadi Kecendrungan Pemerintah 6 tahun terakhir dimana beberapa kepala daerah hingga presiden bahwa kita harus mendukung investasi, investasi di Indonesia naik, kedatangan investor akan sejahterakan rakyat

### **Pengukuran Dampak**

Wilayah Bengkulu 1.987.870 hektare dengan kawasan hutan seluas 920.464 hektare atau 56,5 %,maka sisa dari luas wilayah Bengkulu ,1.057.906 hektare atau 53,5 % saja yang digunakan untuk kawasan perkantoran ,jalan dan pemukiman.Luasnya tersebut di 9 kabupaten dan satu kota seluas 528.065 hektare.”Artinya kawasan yang diperuntukkan yang lain yang bisa dijadikan wilayah budidaya seluas 529.841 hektare dan mayoritas dikuasai perusahaan.

Sekitar 2600 hektar kawasan hutan di kabupaten Bengkulu Tengah terancam menjadi kawasan pertambangan. Tiga perusahaan batubara sudah mengantongi izin untuk kegiatan pertambangan di lokasi itu. epala Bidang Kehutanan, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Tengah, Marzuan Riadi, mengatakan, ketiga perusahaan itu, adalah PT Bukit Sunur, PT Danau Mas Hitam, dan PT Kusuma Raya Utama. Tiap perusahaan akan mengelola 800 hektar lebih. Tiga kawasan tersebut adalah kawasan konservasi seluas 984 hektar yang izin lokasinya dimiliki oleh PT KRU, milik PT Bukit Sunur seluas 885 hektar di kawasan hutan lindung, dan PT DMH 8,32 hektar di kawasan hutan lindung dan 373 di kawasan hutan produksi.

Pendapatan yang didapati oleh Pemerintahan Propinsi Bengkulu, Dari total harga jual 2 hingga 3 triliun rupiah per tahunnya, Bengkulu hanya mendapat sekitar 13 miliar. Jumlah

tersebut bahkan tidak sampai 1 persen dari nilai jual beli batu bara yang dinikmati para pengusaha. Sementara jika dihitung dari total kontribusi yang diterima negara ini, maka jumlah PAD yang diterima tak lebih dari 4,25 persen, atau sekitar 85 miliar rupiah per tahunnya. Jumlah inilah yang kemudian dibagi antara pusat dan daerah. Ketimpangan semakin terasa, karena imbas aktivitas eksploitasi batu bara menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian, seperti kerusakan lingkungan, hingga dampak gangguan kesehatan akibat kondisi jalanan yang terus berdebu.

## **Penutup**

Berdasarkan deskripsi dan pengalaman selama dilaksanakannya scoping study, yang kemudian di tuangkan dalam analisis dan pembahasan, potensi dan prospek pertambangan batubara di propinsi Bengkulu secara menyeluruh dilihat dari cadangan sumber daya mineral, nilai volume produksi, nilai ekspor keluar negeri, serta nilai produksi dan penjualan batubara di propinsi Bengkulu menggambarkan bahwa sektor pertambangan batubara adalah potensi daerah yang dapat menghasilkan pemasukan yang besar apabila ada koordinasi dan hubungan kerjasama yang jelas antara pemerintah dan para pengusaha dan para pihak lainnya termasuk dengan masyarakat sekitar yang akan mendapatkan dampak pertama dari proses dan aktivitas eksploitasi pertambangan tersebut. Sehingga pemerintah serta para pengusaha dapat mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya mineral ini dengan baik demi kemajuan perekonomian daerah

kedepan, tentu saja dengan tidak mengabaikan infrastruktur yang ada.

Permasalahan dampak kerusakan lingkungan akibat tambang batubara di Bengkulu ini, menjadi tantangan yang harus dihadapi tidak hanya oleh pemangku kebijakan maupun oleh investor pertambangan tapi menjadi kontrol bersama di semua elemen masyarakat yang ada di Bengkulu. Umumnya wilayah konsesi tambang yang ada di Bengkulu berada di Hulu beberapa DAS yang ada di Bengkulu dan sebagiannya bersentuhan dengan kawasan hutan.

Sementara dalam bidang transparansi pendapatan dari sektor pertambangan ini adalah menjadi kewajiban bagi Pemerintahan Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang dihasilkan dalam bentuk Dana Bagi Hasil(DBH) dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik. Kondisi ini untuk memastikan penerapan *prinsip transparansi* dimaksudkan agar data/informasi termasuk perumusan kebijakan tentang Pertambangan ditingkat lokal dapat diakses oleh publik, transparansi sangat penting menumbuhkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

## **Rekomendasi Tindak Lanjut**

Ada beberapa catatan penting sebagai rekomendasi sekaligus sebagai tindak lanjut dari proses scoping study yang telah dilaksanakan ini, antara lain;

1. Melalui prakarsa global Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Pelaku di bidang industri ekstraktif (batu bara) harus didorong untuk melaporkan aktivitas usahanya demi mendorong transparansi pendapatan Negara, untuk memastikan EITI ini diketahui oleh pelaku industri ekstraktif (batu bara) di Bengkulu maka kampanye dan mendudukkan persepsi masing-masing pihak adalah aktivitas yang harus dilakukan.
2. Pihak pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Bengkulu membuat peraturan Gubernur tentang Batu Bara, salah satu inisiatif yang dikembangkan oleh Gubernur yaitu transparansi pendapatan hasil batu bara serta keterbukaan realisasi anggaran CSR , maka ini menjadi peluang yang baik untuk dimanfaatkan dalam memasukan isue Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) ke dalam peraturan Gubernur.
3. Bagi masyarakat sipil, dalam menguatkan isue Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) hal yang mendesak dilakukan adalah Pembentukan Kelompok Kerja yang terdiri dari beberapa elemen

dalam mendorong transparansi sektor batu bara di Bengkulu.

4. Pemerintah dan pengusaha harus memperhatikan analisis dampak lingkungan agar tidak ikut mengorbankan masyarakat sebagai akibat rusaknya infrastruktur yang ada. Pemerintah juga harus tegas dalam membuat keputusan terhadap perundangan yang berlaku terkait permasalahan dengan perusahaan tambang agar daerah tidak dirugikan karena tidak sebandingnya kontribusi yang diterima daerah dengan kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan batubara ini.



## **Tentang Akar Foundation**

Akar Foundation merupakan sebuah organisasi non-profit dan non politis yang didirikan untuk ikut serta dalam mengembangkan potensi dan swadaya masyarakat dalam rangka upaya mewujudkan masyarakat yang kritis, mandiri, demokratis dan berkeadilan sosial. Akar Foundation didirikan pada tanggal 12 Juli 2002 kemudian di Akta Notaris pada tahun 2006 dengan No 32 Tanggal 8 September 2006 di Kantor Notaris Is Haryati, SH di Bengkulu. Dan kemudian ter-Inventarisir pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Bengkulu dengan No 200/806/III/KBPM.

Tujuan Akar Foundation adalah Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Yang Mandiri, Berkeadilan, Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Demokratis, dan isu-isu strategis yang di pilih adalah

1. Advokasi Kebijakan (Pembaharuan Agraria dan Pembaharuan Pemerintahan Lokal),
2. Pemberdayaan Masyarakat terutama Masyarakat Adat (penguatan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam),
3. Pengembangan Ekonomi (Penguatan Institusi Ekonomi, Membangun Jaringan Ekonomi).

Akar Foundation melakukan kerja ini dengan berprinsip pada nilai-nilai; Egaliter, Tanggung gugat sosial, Inklusif, Partisipatif, Demokratis, Berwawasan HAM dan Berkeadilan Gender.



Di dalam Perencanaan Tata Ruang (RTRW) Propinsi Bengkulu, disebutkan tujuan pengelolaan kawasan pertambangan adalah untuk memanfaatkan sumberdaya mineral, energi dan bahan galian lainnya, untuk masyarakat, dengan tetap memelihara sumberdaya sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. Suatu tempat dapat dinyatakan sebagai tempat penambangan apabila nilai bahan galian yang ada bernilai ekonomis lebih tinggi dari nilai kegiatan yang ada di atas tanah. Penggalan bahan tambang dapat dilakukan secara besar-besaran oleh perusahaan berbadan hukum atau kecil-kecilan oleh perorangan dengan luas minimum 10 hektar. Dan semua pemanfaatan potensi sumber daya mineral yang ada tersebut perlu dilengkapi dengan studi AMDAL terlebih dahulu. Pemanfaatan atau eksploitasi kawasan pertambangan wajib melaksanakan pemulihan kondisi permukaan lahan kepada kondisi tertentu yang tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan alam.